

## Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang Provinsi Banten

Lily Leviana Putri<sup>1)</sup>, Wulan Desliana<sup>2)</sup>, Intan Cahya Utami<sup>3)</sup>, Umima<sup>4)</sup>, Adli Malik<sup>5)</sup>, Marisa<sup>6)</sup>

<sup>123456</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

email: [lily.lvn23@gmail.com](mailto:lily.lvn23@gmail.com), [wulandesliana@gmail.com](mailto:wulandesliana@gmail.com), [inchyauu@gmail.com](mailto:inchyauu@gmail.com),  
[umimaumi6@gmail.com](mailto:umimaumi6@gmail.com), [adlimalik878@gmail.com](mailto:adlimalik878@gmail.com), [mariissa919@gmail.com](mailto:mariissa919@gmail.com),

(Diterima Desember 2025); Disetujui Januari 2026); Dipublikasikan Maret 2026)

### Abstrak

*Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin tersedianya layanan pendidikan menengah pertama yang memadai di tengah pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama Kota Serang. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan berperan sebagai instrumen utama. Adapun teknik pengumpulan data dari sumber data primer dan data sekunder. Kemudian analisis data dilakukan menurut Miles Huberman & Saldana (2014), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan William N. Dunn yang terdiri atas enam aspek, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Kota Serang, menunjukkan kemajuan tetapi belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah mencapai kategori Tuntas Pratama menandakan perkembangan positif, terutama pada indikator literasi. Namun, indikator numerasi, pemerataan kualitas guru, serta pemenuhan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan.*

**Kata Kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan Menengah Pertama, Kota Serang.*

### Abstract

*As the administrative center of Banten Province, Serang City has a major responsibility to ensure the availability of adequate junior high school education amid population growth and increasing social needs. This study aims to evaluate the implementation of Minimum Service Standards (SPM) for Secondary Education in Serang City. The researcher used a qualitative approach and acted as the main instrument. The data collection techniques were from primary and secondary data sources. Then, data analysis was carried out according to Miles Huberman & Saldana (2014), namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion/verification. This study used William N. Dunn's policy evaluation model, which consists of six aspects, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Accuracy. The results of the study show that the evaluation of the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) for secondary education in Serang City shows progress but is not yet fully optimal. Although it has reached the Tuntas Pratama category, indicating positive development, especially in literacy indicators, numeracy indicators, equal distribution of teacher quality, and fulfillment of facilities and infrastructure remain challenges.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Minimum Service Standards, Junior High School Education, Serang City.*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembentukan generasi yang kompeten, sehingga negara wajib menjamin pemenuhan hak pendidikan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui perluasan akses, pemerataan layanan, dan peningkatan mutu yang diatur dalam kebijakan SPM sesuai UU No. 23/2014, PP No. 2/2018, dan Permendagri No. 59/2021, mencakup sarpras, kualifikasi dan jumlah guru, rombongan belajar, partisipasi pendidikan, serta lingkungan belajar aman dan inklusif. Di Provinsi Banten, jumlah SMP meningkat dari 1.602 pada 2023 menjadi 1.622 pada 2024, namun peningkatan kuantitas belum sepenuhnya dibarengi peningkatan kualitas layanan dasar. NPD Banten 2023 mencatat 23,7% ruang kelas SMP mengalami rusak ringan dan 6,4% rusak berat, kondisi yang masih memengaruhi mutu layanan, pemenuhan standar minimal, dan efektivitas proses pembelajaran.

**Tabel 1. Persentase Guru yang Bersertifikat Pendidik pada Jenjang SMP Provinsi Banten Tahun 2023**

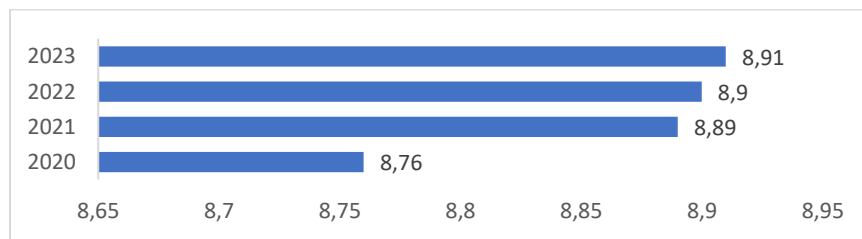
Kabupaten	Keterangan		Kota	Keterangan	
	Jumlah	Persentase		Jumlah	Persentase
Pandeglang	804	32,75	Tangerang	1.323	39,42
Lebak	869	31,17	Cilegon	407	42,8
Tangerang	1.369	23,85	Serang	562	40,61
Serang	828	31,51	Tangerang Selatan	1.002	32,71

Sumber: <https://data.kemendikdasmen.go.id/2025>

Tabel tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan sertifikasi guru SMP di Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang mencatat persentase terendah yaitu 23,85%, disusul Kabupaten Lebak sebesar 31,17% dan Kabupaten Pandeglang sebesar 32,75%. Kota Cilegon menunjukkan capaian tertinggi dengan 42,8%, sementara Kota Serang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten berada pada posisi kedua dengan 40,61%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki peran strategis sebagai ibu kota provinsi, tingkat sertifikasi guru di Kota Serang belum mencerminkan keunggulan yang signifikan. Secara keseluruhan, profesionalisasi guru SMP di Banten masih belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi sesuai ketentuan SPM.

Kota Serang memiliki peran strategis dalam memastikan penyediaan layanan pendidikan menengah pertama di tengah peningkatan kebutuhan sosial, dengan 86 unit jenjang SMP pada tahun 2024 yang terdiri atas 29 sekolah negeri dan 57 sekolah swasta (Dindik, 2024). Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs tahun 2024 mencapai 93,32%, menandakan akses yang relatif luas. Namun, Angka Partisipasi Murni (APM) masih berada di angka 83,68% mengindikasikan sebagian anak usia 13-15 tahun belum bersekolah sesuai jenjangnya (BPS Kota Serang, 2024). Selain itu, capaian pendidikan di Kota Serang juga terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (LRS) penduduk usia di atas 15 tahun meningkat secara bertahap selama 2020–2023, namun masih berada pada kisaran delapan tahun, menunjukkan bahwa capaian pendidikan masyarakat Kota Serang belum mengalami peningkatan yang substansial.

**Gambar 1. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun**



Sumber: [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, 2025.](#)

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Serang hanya menempuh pendidikan hingga sekitar kelas VIII. Artinya, sebagian besar masyarakat belum menuntaskan jenjang SMP. Mutu serta pemerataan layanan pendidikan masih perlu diperkuat guna mendorong peningkatan kapasitas SDM dan keberlanjutan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tantangan semakin terlihat adanya sarana prasarana di sejumlah sekolah, sehingga berdampak pada perbedaan kualitas pembelajaran antarsekolah. Oleh karena itu, perluasan akses pendidikan harus dibarengi dengan pemerataan kualitas sarpras agar layanan pendidikan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh peserta didik.

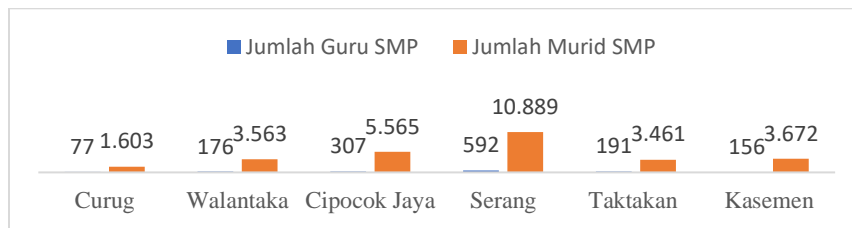
**Tabel 2. Kondisi Ruang Kelas Rusak Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Kondisi Kelas Rusak	No	Kecamatan	Jumlah Kondisi Kelas Rusak
1.	Cipocok Jaya	35	4.	Serang	41
2.	Curug	21	5.	Taktakan	15
3.	Kasemen	23	6.	Walantaka	49
<b>TOTAL</b>					<b>147</b>

Sumber: Pemerintah Kota Serang, 2025.

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa sejumlah SMP masih beroperasi dengan fasilitas yang tidak layak, sehingga berpotensi menurunkan mutu layanan pendidikan. Temuan ini diperkuat oleh laporan Dindik Kota Serang tahun 2025, mencatat kekurangan sekitar 20 gedung SMP Negeri, sehingga daya tampung sekolah tidak sejalan dengan peningkatan lulusan SD ([Bantentv.com, 2025](#)). Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur memperlihatkan bahwa sarana prasarana menjadi kendala utama dalam pemenuhan SPM. Kualitas pendidik turut menentukan pencapaian SPM jenjang SMP. Data BPS Kota Serang tahun 2024 juga menunjukkan bahwa ketidakseimbangan distribusi guru dan jumlah siswa turut mempengaruhi mutu pembelajaran dan efektivitas pemenuhan standar layanan.

**Gambar 2. Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan Tahun 2024**



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025.

Rasio guru murid SMP Kota Serang tahun 2024 masih belum seimbang, dengan 1.499 guru dan 28.753 siswa yang distribusinya tidak merata antar kecamatan sehingga belum memenuhi rasio ideal SPM 1:32. Pemenuhan sertifikasi guru juga masih rendah dan timpang, di mana dari 1.389 guru berpendidikan S1 ke atas, baru 629 yang tersertifikasi sementara 837 belum, dengan ketimpangan mencolok di Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, dan Walantaka yang masing-masing mencatat lebih dari seratus guru non-sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesionalisasi guru dan pemerataan tenaga pendidik masih menjadi tantangan penting dalam pemenuhan SPM dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Serang.

Permasalahan penting lainnya terlihat dari masih rendahnya akreditasi sejumlah sekolah di Kota Serang menunjukkan bahwa pemenuhan standar nasional pendidikan belum merata. Variasi akreditasi tersebut terkait dengan keterbatasan sarana prasarana, serta ketimpangan kompetensi guru yang memengaruhi mutu pembelajaran. Keberadaan sekolah berakreditasi C atau belum terakreditasi menandakan perlunya peningkatan sarpras dan kapasitas pendidik untuk mencapai standar layanan pendidikan yang diharapkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Pendidikan SMP di Kota Serang guna mengidentifikasi faktor penghambat, menilai efektivitas program yang berjalan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **“Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang Provinsi Banten”**.

## METODE

Dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang Provinsi Banten, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2012) penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada eksplorasi dan pendalaman terhadap fenomena sosial atau lingkungan sosial, mencakup berbagai elemen seperti pelaku, peristiwa, lokasi, serta waktu. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama dan membutuhkan media untuk penunjang selama penelitian berlangsung, yaitu berupa buku catatan, alat perekam, dan kamera. Fokus pada penelitian ini terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama dengan melibatkan informan terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Sedangkan lokus penelitian berfokus di Kota Serang Provinsi Banten. Adapun teknik pengumpulan data dari sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian sedangkan data sekunder berupa dokumen, artikel, buku, thesis, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Kemudian analisis data dilakukan menurut Miles

Huberman & Saldana (2014), yang terdiri atas empat proses analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu program mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan hasil nyata bagi penerima layanan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, implementasi SPM pada jenjang ini telah diarahkan untuk tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga mendorong perubahan pada proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Capaian Indeks SPM Kota Serang tahun 2025 yang mencapai nilai 71,56 dengan status Tuntas Pratama menunjukkan adanya kemajuan dalam pemenuhan indikator prioritas. Literasi tercatat sebagai capaian terbaik, sementara numerasi masih menjadi indikator terendah meskipun mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa program peningkatan mutu pembelajaran telah memberikan pengaruh positif, meskipun kemampuan numerasi masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Peningkatan nilai indeks juga mencerminkan perbaikan dalam proses pemantauan indikator dan pengelolaan program di tingkat sekolah.

**Gambar 3. SMPN 1 Kota Serang**



*Sumber: banten.headline.com*

Sarana prasarana SMP di Kota Serang yang umumnya baik dan mayoritas bertingkat termasuk SMPN 1 sebagai representasinya memberikan dukungan kuat bagi kelancaran pembelajaran dan pencapaian kompetensi dasar. Kondisi ini diperkuat oleh penguatan supervisi, peningkatan kualitas pelaporan, serta program literasi dan pengembangan kapasitas guru yang mendorong efektivitas pelaksanaan SPM. Kendati pemetaan kebutuhan guru belum sepenuhnya akurat karena masih berfokus pada tenaga ASN, evaluasi keseluruhan menunjukkan tren positif melalui peningkatan indeks SPM, stabilnya capaian literasi, membaiknya numerasi, dan tingginya partisipasi pendidikan, meskipun kesenjangan mutu antarsekolah masih perlu diperhatikan.

#### **2. Efisiensi**

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan menurut Dunn menekankan pada kemampuan suatu program mengelola sumber daya untuk menghasilkan keluaran secara optimal. Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang, efisiensi

dipahami sebagai sejauh mana anggaran pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta mekanisme pelaksanaan mampu dimanfaatkan secara proporsional untuk memenuhi indikator layanan dasar. Dengan demikian, penilaian efisiensi tidak hanya melihat kecukupan input, tetapi juga bagaimana seluruh proses berjalan dan seberapa besar hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya tersebut.

Efisiensi pelaksanaan SPM SMP di Kota Serang terlihat dari pemantauan indikator yang dilakukan rutin melalui sistem pelaporan digital, sehingga koordinasi lebih cepat dan administrasi lebih sederhana. Namun, akurasi pemetaan kebutuhan guru masih kurang karena tidak memasukkan peran guru non-ASN, sehingga distribusi tenaga pendidik belum sepenuhnya efisien. Dari rasio input–output, capaian seperti Indeks SPM 71,56, peningkatan literasi dan numerasi, serta APM 100% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah menghasilkan keluaran yang sepadan. Investasi pemerintah dalam sarpras dan pembiayaan juga efektif mendukung kualitas layanan dasar. Secara keseluruhan, efisiensi implementasi SPM sudah baik, meski pengelolaan tenaga pendidik masih perlu diperbaiki agar efisiensi merata di seluruh sekolah.

### 3. Kecukupan

Kecukupan pemenuhan SPM SMP di Kota Serang dapat dilihat dari realisasi delapan indikator prioritas SPM 2024, yang mencakup ruang belajar aman dan inklusif, capaian literasi numerasi, layanan kebutuhan khusus, kurikulum, dan pemenuhan tenaga pendidik. Secara nasional, capaian literasi dan numerasi SMP pada 2024 masih berada pada level berkembang dengan nilai masing-masing 53 dan 50. Di Kota Serang, Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan SPM berada pada kategori Tuntas Pratama dengan skor 71,56, menandakan sebagian besar indikator telah terpenuhi meski belum optimal. Indikator numerasi masih menjadi gap terbesar, sementara literasi menunjukkan capaian terbaik.

**Tabel 3. Laporan Rapor Pendidikan di Kota Serang Tahun 2025**

No	Indikator	Jenjang	Capaian		<i>Adjusted target</i>	Target
			2023	2024	2025	2026
1	A.1 Kemampuan Literasi	SMP	64,56	68,97	70,07	71,17
2	A.2 Kemampuan Numerasi		58,29	61,57	63,07	64,57
3	B.13 Angka Partisipasi Sekolah		96,14	97,08	97,77	98,47
4	D.10 Iklim Inklusivitas		53,74	55,85	58,25	60,65
5	D.4 Iklim Keamanan		66,26	69,44	70,94	72,44
6	D.8 Iklim Kebinekaan		70,22	69,52	70,52	71,52

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, 2025.

Data Rapor Pendidikan Kota Serang 2025 menunjukkan peningkatan bertahap pada indikator SPM jenjang SMP, terutama literasi, numerasi, dan partisipasi sekolah, meskipun numerasi masih meningkat lambat dan indikator lingkungan belajar seperti inklusivitas, keamanan,

*Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang Provinsi Banten*

serta kebinekaan tetap berada pada kategori sedang. Pemenuhan sarpras juga belum merata, ditandai 28% sekolah belum memiliki laboratorium layak dan 19% belum memenuhi standar sanitasi (BPS Banten 2024). Pemerintah telah mendorong pemerataan akses melalui program Pengembalian ATS, namun pemetaan guru masih terkendala karena guru honorer tidak tercatat dalam indikator SPM. Secara keseluruhan, meski implementasi SPM menunjukkan tren positif, penguatan masih diperlukan terutama pada pemenuhan fasilitas dan tata kelola data tenaga pendidik.

**4. Pemerataan**

Menurut William N. Dunn dalam Akbar (2018), pemerataan (*equity*) merupakan kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat, hasil, dan alokasi sumber daya publik didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran. Pemerataan tidak hanya dilihat dari capaian agregat, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi sekolah, wilayah, dan kelompok peserta didik yang berbeda kebutuhan dan kondisinya. Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang, pemerataan dapat dianalisis melalui distribusi mutu antar kecamatan, kesenjangan capaian antara sekolah negeri dan swasta, serta keterjangkauan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Berikut kondisi pemerataan mutu pendidikan, yang menggunakan data akreditasi sekolah jenjang SMP di Kota Serang Tahun 2024.

**Tabel 4. Data Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Serang**

No.	Kecamatan	Jumlah SMP		Akreditasi SMP Negeri			Akreditasi SMP Swasta		
		Negeri	Swasta	A	B	C	A	B	C
1.	Cipocok Jaya	5	11	2	2	1	2	8	1
2.	Curug	3	1	1	2	0	0	0	1
3.	Kasemen	5	2	1	4	0	0	2	0
4.	Serang	9	25	8	1	0	7	10	8
5.	Taktakan	4	9	3	1	0	1	4	4
6.	Walantaka	3	9	1	2	0	1	7	1
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>57</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>15</b>

*Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2024.*

Berdasarkan data akreditasi SMP di Kota Serang tahun 2024, terlihat bahwa pemerataan mutu pendidikan masih belum tercapai sepenuhnya, baik antar kecamatan maupun antar jenis sekolah. Kecamatan Serang menunjukkan capaian yang lebih baik dengan jumlah sekolah swasta terbanyak dan kualitas akreditasi lebih tinggi, sementara wilayah seperti Kasemen dan Taktakan masih berada pada kategori rendah. Perbedaan mutu juga tampak antara sekolah negeri yang cenderung stabil dan sekolah swasta yang memiliki rentang mutu lebih bervariasi. Temuan ini diperkuat hasil observasi, yang menyatakan bahwa meskipun seluruh sekolah menerima akses kebijakan yang sama seperti BOS, kurikulum, dan pelatihan guru, perbedaan kapasitas manajemen sekolah serta fasilitas, terutama terkait pendidikan inklusif, masih menjadi faktor utama kesenjangan mutu.

**5. Responsivitas**

Responsivitas kebijakan menunjukkan kemampuan program menjawab kebutuhan dan nilai masyarakat. Menurut William Dunn, responsivitas tercermin dari sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik (Nadila, 2023). Berdasarkan hasil wawancara, penerapan SPM Pendidikan SMP di Kota Serang sudah sesuai kebutuhan peserta didik dan sekolah, hal ini tampak dari layanan PAUD, pendidikan dasar, SMP, dan kesetaraan yang berjalan dengan belum adanya keluhan signifikan serta adanya program ATS, pemberian seragam, dan dukungan transportasi bagi siswa kurang mampu. Responsivitas juga diperkuat oleh ketersediaan kanal pengaduan seperti aplikasi RABEG yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dan pos layanan Disdikbud. Selain itu, peningkatan indikator SPM dan aktivitas literasi menunjukkan dukungan positif masyarakat dan sekolah. Dengan demikian, implementasi SPM di Kota Serang dapat dinilai responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi penerima layanan.

**Gambar 4. Pos Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang**



*Sumber: Peneliti, 2025*

Berdasarkan Gambar 3, Disdikbud Kota Serang menyediakan Pos Pelayanan dengan tiga loket yang memiliki fungsi berbeda. Loket 1 melayani urusan PAUDNI, GTK, kebudayaan, pengaduan, dan layanan disabilitas. Loket 2 menangani seluruh pelayanan terkait SD dan SMP, termasuk kebutuhan administrasi dan informasi pendidikan dasar. Loket 3 berfokus pada kesekretariatan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Pembagian fungsi yang jelas ini menunjukkan upaya Disdikbud menyediakan layanan yang terstruktur, mudah diakses, dan mampu menampung aspirasi masyarakat sehingga meningkatkan responsivitas dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan berkaitan dengan manfaat program dan kekuatan asumsi yang mendasarinya. Sesuai pandangan William Dunn, ketepatan menilai sejauh mana alternatif benar-benar memenuhi tujuan substansial (Nadila, 2023). Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan SPM Pendidikan SMP di Kota Serang telah meningkatkan kualitas layanan, tercermin dari naiknya rapor pendidikan, hasil AN, capaian literasi numerasi, serta pembangunan ruang kelas dan sarpras. Implementasi SPM juga tepat sasaran melalui program ATS, Dana BOS, insentif guru TK, perbaikan rasio guru, dan pemerataan dukungan bagi sekolah negeri swasta, sehingga menjawab masalah akses dan mutu pembelajaran. Kendati pemetaan guru ASN masih menjadi kendala, secara umum SPM sudah sesuai kebutuhan daerah. Ketepatan implementasi dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan pemetaan guru dan optimalisasi anggaran agar SPM menjangkau seluruh sasaran lebih efektif.

**Gambar 5. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Guru Agama Islam (PAI) SD dan SMP Se- Kota Serang Tahun 2025**



*Sumber: Disdikbud Kota Serang, 2025*

Berdasarkan Gambar 4, Disdikbud Kota Serang melaksanakan pembinaan dan peningkatan mutu guru sebagai upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan di SMP. Program ini dinilai tepat karena memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran. Asumsi dasarnya kuat, yaitu bahwa guru yang berkualitas mampu memenuhi standar layanan pendidikan dasar, termasuk pembelajaran dan bimbingan sesuai SPM. Dengan demikian, program pembinaan guru menjadi pilihan yang rasional karena selaras dengan kewajiban pemda dalam pemenuhan SPM Pendidikan Menengah Pertama dan mendukung tercapainya tujuan layanan pendidikan di Kota Serang.

## ***Pembahasan***

### **1. Efektivitas**

Efektivitas penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah Pertama di Kota Serang menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan. Peningkatan Indeks SPM menjadi 71,56 pada tahun 2025 menandakan bahwa sebagian besar indikator prioritas, khususnya literasi yang menjadi capaian terbaik dan numerasi yang meski masih rendah namun menunjukkan peningkatan signifikan, berjalan pada arah yang tepat. Mutu satuan pendidikan turut memperkuat efektivitas program, di mana fasilitas SMP di Kota Serang secara umum berada dalam kondisi baik, bangunan mayoritas dua lantai, dan sarpras relatif memadai sehingga mendukung proses pembelajaran. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pembiasaan literasi, pendampingan guru, dan perbaikan tata kelola pelaporan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sekolah. Selain itu, APM SMP yang telah mencapai 100% menegaskan bahwa akses layanan pendidikan telah menjangkau hampir seluruh peserta didik usia sekolah. Meskipun masih terdapat tantangan seperti ketimpangan mutu antarsekolah dan pemetaan kebutuhan guru yang belum ideal, secara keseluruhan pelaksanaan SPM SMP di Kota Serang dapat dikatakan efektif karena mampu menghasilkan perubahan positif pada kompetensi siswa, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

### **2. Efisiensi**

Efisiensi pelaksanaan SPM SMP di Kota Serang tercermin dari pemanfaatan sarana prasarana yang baik dan mayoritas bertingkat, sehingga kegiatan belajar berjalan tanpa kendala berarti. Anggaran pendidikan digunakan secara terarah untuk mendukung program prioritas seperti literasi, peningkatan kompetensi guru, dan pemeliharaan fasilitas, sedangkan proses pelaksanaan diperkuat melalui pemantauan rutin dan pelaporan digital yang mempercepat koordinasi. Meskipun pemetaan kebutuhan guru masih belum sepenuhnya akurat karena hanya mengacu pada tenaga ASN, rasio input–output menunjukkan hasil yang positif melalui peningkatan Indeks SPM, perbaikan literasi dan numerasi, serta APM SMP yang telah mencapai 100%. Secara keseluruhan, implementasi SPM dapat dinilai efisien meski masih memerlukan penyesuaian dalam distribusi tenaga pendidik.

### **3. Kecukupan**

Aspek kecukupan menurut Dunn menilai kemampuan kebijakan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM SMP di Kota Serang telah mengalami kemajuan dengan capaian Tuntas Pratama pada Rapor Pendidikan 2025 (71,56), terutama pada literasi dan akses pendidikan. Namun, peningkatan numerasi dan kualitas lingkungan belajar masih lambat. Pemenuhan sarana prasarana juga belum memadai, sebagaimana data BPS 2024 yang menunjukkan keterbatasan sanitasi, laboratorium, dan ruang kelas layak. Selain itu, pemetaan tenaga pendidik belum optimal karena peran guru honorer belum sepenuhnya tercatat dalam perhitungan kebutuhan guru. Kondisi ini sejalan dengan temuan Subki dkk (2022) bahwa terdapat gap antara input dan hasil dalam implementasi SPM. Dengan demikian, aspek kecukupan SPM di Kota Serang masih perlu diperkuat melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan tata kelola guru agar layanan benar-benar memenuhi standar minimal.

### **4. Pemerataan**

Pemerataan menurut Dunn menilai keadilan distribusi manfaat dan sumber daya kebijakan bagi seluruh kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM SMP di Kota Serang telah mengarah pada perluasan akses pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta, namun pemerataannya belum optimal. Masih terdapat kesenjangan mutu berdasarkan data akreditasi, terutama antar kecamatan dan antar sekolah swasta, sementara sekolah negeri relatif lebih konsisten memenuhi standar. Sekolah dengan fasilitas terbatas dan kelompok rentan juga masih memerlukan dukungan afirmatif agar mendapatkan layanan sesuai standar minimal. Temuan ini sejalan dengan Prasetya dkk. (2018) yang mencatat ketidakmerataan implementasi SPM akibat perbedaan kapasitas SDM dan pendanaan. Dengan demikian, penguatan pemerataan di Kota Serang perlu difokuskan pada distribusi sumber daya yang lebih adil, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta intervensi berkelanjutan bagi sekolah dengan capaian rendah.

### **5. Responsivitas**

Responsivitas penerapan SPM Pendidikan SMP di Kota Serang tergolong cukup baik, terlihat dari tersedianya kanal pengaduan seperti aplikasi RABEG yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dan pos pelayanan Disdikbud yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan untuk segera ditindaklanjuti oleh bidang teknis. Responsivitas ini juga tampak melalui program bantuan seragam, dukungan transportasi, dan Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) yang langsung mengatasi hambatan ekonomi peserta didik. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Annarhi (2022) yang menegaskan bahwa responsivitas daerah menjadi faktor penting keberhasilan SPM, serta diperkuat oleh studi Inayati et.al (2023) yang menunjukkan bahwa responsivitas aparat berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan. Secara keseluruhan, penerapan SPM di Kota Serang dapat dinilai responsif, meskipun peningkatan sarpras dan pemerataan guru masih perlu diperkuat.



- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. Buku Saku Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (R. T. Sari (ed.); Cetakan I). Ar-Ruzz Media.
- Nurwidya, M. P., Wulandari, H. D., & Handayani, A. (2025). Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Pendidik dalam Menjamin Kualitas Pembelajaran Matematika di Tingkat Sekolah Dasar. VIII(1), 95–110.
- Prasetya, T., Faozanudin, M., & Puspita, D.R.(2018). *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM-DIKDAS) Tingkat SMP (Studi Pada SMPN 6 Satu Atap Rembang Dan SMPN 3 Purbalingga)*. The Indonesian Journal Of Public Admministration. Vol 4 (1). Hal. 1-24.
- Rapor Pendidikan. (2024). *Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rapor Pendidikan Daerah*. Diunduh Dari: <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/>. Diakses Pada 27 November 2025.
- Subki, Syafari A. & Arenawati. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Minimal Pelayanan Pendidikan Menengah Di Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. Vol. 06 (01). Hal 46-63.